

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki banyak catatan hubungan diplomatik yang positif dengan Palestina pasca kemerdekaan. Setelah Mesir, Palestina adalah negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Selain itu, mufti Palestina yang bernama Amin Al Husaini merupakan tokoh yang menyebarkan berita tentang kemerdekaan Indonesia melalui radio internasional.¹ Sebaliknya, Indonesia banyak membantu Palestina dalam perjuangannya melawan penjajahan. Presiden Indonesia saat itu, IR. Soekarno, mengecam segala bentuk penjajahan pada tahun 1955 di Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung. Konferensi Asia-Afrika (KAA) memutuskan untuk mendukung hak-hak bangsa Arab di Palestina.² Ketika Asian Games IV di Jakarta pada tahun 1962, Indonesia menolak memberikan visa kepada Negara Israel karena tidak memiliki hubungan diplomatik.³

Indonesia menjadi negara aktif dalam penanganan isu kemanusiaan di Asia Tenggara.⁴ Indonesia selalu berupaya menyelesaikan konflik di seluruh dunia dengan menggunakan pendekatan diplomasi kemanusiaan guna mewujudkan ketertiban dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di berbagai kesempatan, seperti pada pertemuan internasional, Indonesia selalu mendorong untuk menjadikan masalah kemanusiaan sebagai topik utama dalam diskusi.

¹ Prasetya, M. N. & Srifauzi, A. (2018). Diplomasi Politik Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina. *Jurnal PIR: Power In International Relations*, 2(2), 179-193.

² Kusmayadi, Y. (2018). Pengaruh Konferensi Asia Afrika (KAA) Tahun 1955 Terhadap Kemerdekaan Negara-Negara Di Benua Afrika. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 8(01), 15-34. <https://doi.org/10.25273/Ajsp.V8i01.1586>.

³ Wirayudha, R. (2017, Desember 11). Mengucilkan Israel Di Arena Olahraga. *Historia*. Tersedia Pada: <https://historia.id/olahraga/articles/mengucilkan-israel-di-arena-olahraga-bagian-i-vqr7e>.

⁴ <https://ksap.dpr.go.id/fokus/kemanusiaan>

Sebenarnya, Indonesia melakukan diplomasi kemanusiaan tidak terlepas dari tekanan dalam negeri, baik individu dan kelompok seperti NGO. *Non-Governmental Organization* (NGO) adalah organisasi yang didirikan oleh individu maupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan layanan kepada masyarakat umum tanpa maksud mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang dilakukan. NGO memiliki karakteristik yang bercirikan non-partisipan, tidak mencari keuntungan ekonomi, bersifat sukarela, dan bersendi pada gerakan moral.⁵

Diplomasi kemanusiaan adalah upaya untuk mendorong mereka yang berkuasa untuk memperhatikan kepentingan, melindungi dan menyelamatkan pihak yang lemah. Pihak yang dimaksud adalah korban konflik, perang atau bencana alam. Diplomasi ini bersifat ad hoc yang dimana dilakukan dengan cara yang tidak biasa dan tergantung dari kondisi krisis, serta mengikutsertakan banyak aktor. Artinya, bahwa praktik diplomasi kemanusiaan digunakan pada sebuah krisis, yang terjadi dalam rentang waktu dan wilayah tertentu. Larry Minear, dan Hazel Smith dalam bukunya yang berjudul "*Humanitarian Diplomacy: Practitioner and Their Craft*", mendefinisikan Diplomasi kemanusiaan sebagai upaya yang dilakukan oleh aktor, baik negara lain dan non-negara dalam mendapatkan akses terhadap masyarakat yang terdampak krisis di suatu negara. Diplomasi kemanusiaan digunakan agar aktor kemanusiaan mendapatkan ruang dalam politik dan militer.⁶

Indonesia memiliki beberapa komponen penting dalam politik internasionalnya, salah satunya adalah diplomasi kemanusiaan. Ini dilakukan dengan mengedepankan beberapa prinsip dasar, seperti: (1) prinsip perlindungan

⁵ Martharia, P. (2014). *Role Of NGO Dan CBO Dalam Penguatan Pengarusutamaan Gender. Kebijakan Dan Pembangunan*, 21-27

⁶ Larry Minear And Hazel Smith, *Humanitarian Diplomacy: Practitioners And Their Craft* (Tokyo: United Nations University Press, 2007), Hlm 1.

hak asasi manusia bagi masyarakat yang terkena krisis; (2) prinsip inklusi dan non-diskriminasi dalam pemberian bantuan; dan (3) prinsip kemanusiaan. Diharapkan bahwa pendekatan prinsip-prinsip ini akan menumbuhkan “trust” antara negara dan masyarakat penerima bantuan Indonesia. Diharapkan juga bantuan kemanusiaan dari Indonesia akan membantu pembangunan berkelanjutan di negara-negara yang terkena dampak bencana dan krisis.

Sebagaimana diamanatkan Konstitusi, Pemerintah Indonesia terus berperan aktif dalam mendukung upaya penanganan dan penyelesaian krisis kemanusiaan global. Masyarakat global pun semakin meningkatkan pengharapan kepada Indonesia untuk dapat berperan lebih dalam upaya penanganan dan penyelesaian krisis global baik akibat konflik maupun bencana. Indonesia secara konsisten menyampaikan kontribusi sukarela tahunan kepada CERF yang jumlahnya terus ditingkatkan hingga USD 220.000 mulai tahun 2017. Total Kontribusi Indonesia pada CERF mencapai lebih dari USD 1 juta, dan menjadikan Indonesia sebagai negara kontributor CERF terbesar di Asia Tenggara. Pengakuan komunitas internasional terhadap kepemimpinan Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan juga ditunjukkan dengan ditunjuknya perwakilan Indonesia sebagai salah satu anggota Advisory Board for CERF tahun 2019 – 2020.⁷

Isu Palestina merupakan prioritas dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia selalu menegaskan dukungannya terhadap Palestina sebagai negara berdaulat dan menyerukan two-state solution dalam berbagai forum internasional sebagai solusi penyelesaian konflik. Indonesia aktif memberikan bantuan kepada Palestina melalui bantuan finansial dan program pembangunan kapasitas. Indonesia

⁷ https://Kemlu.Go.Id/Portal/Id/Read/88/Halaman_List_Lainnya/Isu-Isu-Kemanusiaan

mengutuk agresi Israel di Gaza, pembunuhan massal terhadap warga sipil, dan blokade Israel di Gaza. Indonesia menolak sikap double standard terhadap kejahatan Israel dan menekankan bahwa akar konflik Israel-Palestina adalah pendudukan Israel serta pelanggaran HAM terhadap rakyat Palestina.

Dalam menangani isu-isu kemanusiaan saat ini, aktor yang dibutuhkan bukan hanya negara saja, karena peran aktor non-negara seperti NGO juga sangat diperlukan. NGO telah menjadi aktor yang sangat influensial dalam dunia politik sejak lebih dari tiga decade terakhir. Tidak ada lagi yang bisa mengabaikan pentingnya NGO dalam hal dampak, sumber daya, keahlian, dan pengetahuan mereka⁸. NGO yang peneliti gunakan untuk objek kajian ini adalah KNRP (Komite Nasional Untuk Rakyat Palestina)

Bentuk diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh KNRP (Komite Nasional Untuk Rakyat Palestina) berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak konflik di Palestina. Sebagai organisasi kemanusiaan internasional, KNRP melaksanakan berbagai program bantuan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah tersebut, seperti bantuan pangan, kesehatan, dan pendidikan. Kolaborasi yang erat dengan lembaga internasional dan lokal memungkinkan KNRP untuk mengoptimalkan sumber daya dan memperluas jangkauan programnya, sehingga berdampak positif bagi lebih banyak orang. Selain itu, diplomasi kemanusiaan ini juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran global mengenai isu-isu kemanusiaan yang dihadapi oleh rakyat Palestina, yang seringkali kurang mendapatkan perhatian di panggung internasional. Meskipun menghadapi

⁸ Youngwan Kim. "The Unveiled Power Of Ngos: How Ngos Influence States' Foreign Policy Behaviors", Phd (Doctor Of Philosophy) Thesis, University Of Iowa, 2011

tantangan seperti keterbatasan akses dan sumber daya, KNRP terus beradaptasi dengan mencari solusi inovatif untuk menghadapi hambatan tersebut, memastikan bahwa bantuan tetap dapat disalurkan dengan efektif kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, peran KNRP dalam diplomasi kemanusiaan tidak hanya memberikan bantuan praktis, tetapi juga menciptakan momentum bagi perubahan sosial yang lebih luas.

KNRP (Komite Nasional untuk Rakyat Palestina) merupakan salah satu organisasi dan juga pelaku gerakan sosial. Sesuai dengan namanya organisasi ini bergerak di bidang kemanusiaan, khususnya tentang Palestina. Organisasi ini didirikan pada hari juma'at 08 Mei 2006 yang bertujuan untuk mewujudkan solidaritas demi mengoptimalkan bantuan Komite Nasional Untuk Rakyat Palestina. KNRP telah banyak menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial seperti ceramah, seminar, dan seni. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menggalang dana dan memberikan edukasi ke masyarakat agar mengetahui dan peka terhadap permasalahan Palestina. KNRP sudah ada di 22 provinsi di Indonesia yang tersebar di Jawa Barat, Bengkulu, Samarinda, Balikpapan, Yogyakarta, Ternate, Bengkalis, Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kalimantan, Surabaya, Batam dan lain-lain.⁹

Adanya konflik yang terjadi antara Israel-Palestina membuat masyarakat Palestina harus mengalami krisis kemanusiaan. KNRP sebagai LSM yang bergerak dibidang kemanusiaan terus memberikan beberapa bantuan kemanusiaan untuk mengurangi penderitaan masyarakat Palestina.¹⁰ Komitmen Indonesia terhadap

⁹ KNRP. (2020). "Komite Nasional Rakyat Palestina-KNRP-Komite Nasional Rakyat Palestina

¹⁰ KNRP. (2020). "Aktivitas-Komite Nasional Rakyat Palestina-KNRP". KNRP.Org, 2020. <https://Knrp.Org/Aktivitas/>

kemanusiaan internasional terlihat jelas melalui peran penting KNRP dalam diplomasi kemanusiaan di Palestina. KNRP dibentuk sebagai respons terhadap krisis yang berkepanjangan di wilayah tersebut dan bertujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan serta meningkatkan kesadaran publik tentang kondisi yang dihadapi rakyat Palestina. Melalui berbagai program seperti penggalangan dana, penyediaan bantuan medis, dan pendidikan, KNRP berupaya membangun solidaritas di kalangan masyarakat Indonesia dan memperkuat dukungan untuk Palestina. KNRP juga menjalin hubungan erat dengan pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa misi kemanusiaan ini sejalan dengan kebijakan luar negeri negara. Meskipun demikian, KNRP menghadapi tantangan signifikan, termasuk keterbatasan sumber daya dan kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan dari masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks tersebut, KNRP memainkan peran yang krusial dalam membentuk opini publik dan mendorong partisipasi internasional dalam upaya kemanusiaan tersebut.

KNRP dibentuk dilatarbelakangi oleh rasa solidaritas terhadap rakyat Palestina yang kondisinya semakin hari semakin memprihatinkan akibat embargo yang dilakukan Israel, didukung Amerika Serikat (AS) dan sekutu dekatnya, Uni Eropa (UE). Komite Nasional untuk Rakyat Palestina merupakan salah satu organisasi yang berperan serta dalam upaya mengentaskan kemiskinan, menyalurkan bantuan kemanusiaan, dan membantu menyejahterakan masyarakat Palestina. Lembaga ini menjadikan dirinya sebagai mediator bagi umat Islam dan bangsa Indonesia untuk mewujudkan rasa solidaritasnya dalam memberikan

dukungan dan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.¹¹ Cabang KNRP sudah banyak di setiap wilayah di Indonesia, salah-satunya cabang yaitu KNPR Sumbar. Alasan peneliti mengambil KNRP Sumbar sebagai objek kajian yaitu, peneliti ikut berpartisipasi dalam organisasi ini, sehingga menimbulkan keinginan untuk melihat bentuk serta upaya KNRP Sumbar dalam diplomasi kemanusiaan untuk palestina.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, KNRP Sumbar diketuai oleh Safar, secara sekala nasional KNRP Sumbar sudah berdiri sejak tahun 2006 dan baru tahun 2010 berkembang di Sumatera Barat, karena situasi dan kondisi saat itu yang membuat KNRP Sumbar baru beroperasi dengan baik tahun 2010. Penyaluran donasi ke Palestina yang dilakukan KNRP Sumbar sebanyak tiga kali secara global melalui donasi reguler, distribusi Ramadhan saat Idul Fitri, dan musim dingin. Donasi rutin dari KNRP Sumbar menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam membantu masyarakat di Palestina oleh warga Sumatera Barat. Bantuan yang diberikan oleh KNRP antara lain yaitu: a) KNRP bekerja sama dengan Lembaga Dakwah Kampus Sekolah tinggi Islam SEBI untuk menggelar Konser Amal Penggalangan Dana untuk rakyat Palestina. b) KNRP menjadi pendukung di acara Palestina Solidarity Day yang berhasil mengumpulkan Rp 750 juta untuk disumbangkan kepada masyarakat Palestina. c) KNRP juga memberikan bantuan fasilitas berupa obat-obatan, memberikan bantuan makanan, memberikan bantuan listrik, serta memberikan fasilitas air bersih.

Sejak berdirinya, KNRP Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya diplomasi kemanusiaan untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.

¹¹ Alawiyah, Eli. 2014. "*Strategi Rekrutmen Komite Nasional Relawan Palestina (KNRP) Dalam Meningkatkan Penggalangan Dana*. Skripsi Komunikasi Islam Universitas Islam Negeri Hidayatullah".

Salah satunya adalah melalui kampanye penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat Sumatera Barat mengenai konflik di Palestina dan pentingnya solidaritas internasional dalam menyelesaikan masalah tersebut. Melalui kegiatan ini, KNRP Sumatera Barat berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat Sumatera Barat akan pentingnya peran solidaritas internasional dalam menyelesaikan konflik di Palestina.

Selain itu, KNRP Sumatera Barat juga aktif dalam menggalang dukungan dan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina yang terus menderita akibat blokade dan penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Melalui kerjasama dengan berbagai lembaga dan organisasi kemanusiaan di Sumatera Barat maupun internasional, KNRP Sumatera Barat berhasil mengumpulkan bantuan kemanusiaan untuk disalurkan langsung kepada rakyat Palestina yang membutuhkan.

Upaya diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh KNRP Sumatera Barat bukan hanya sebatas memberikan bantuan materiil, namun juga melakukan advokasi dan lobbying kepada pemerintah Indonesia dan lembaga internasional untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Melalui kerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemerintah, KNRP Sumatera Barat terus mendorong untuk meningkatkan tekanan internasional terhadap Israel agar segera menghentikan penjajahan dan blokade terhadap rakyat Palestina.¹²

Dengan melihat hal tersebut tidak mudah bagi para penggiat kemanusiaan (LSM) untuk menembus dan memberikan bantuan ke wilayah tersebut. Penelitian ini menarik untuk diteliti karena dalam hal ini KNRP tidak hanya berupaya untuk

¹² Yudriza, Sholihin (2020) *Strategi Komite Nasional Relawan Palestina Sumatera Barat Memobilisasi Massa (Studi Terhadap Aksi Solidaritas Palestina Di Kota Padang)*. Diploma Thesis, Universitas Andalas.

menembus batas yang dilakukan oleh Israel dan Mesir tetapi KNRP juga berjuang untuk melakukan diplomasi kemanusiaannya yang dilakukan dengan menggalang simpati dan tekanan internasional agar Israel dan Mesir dapat melonggarkan blokade di Jalur Gaza Palestina.

Penelitian ini fokus pada upaya KNRP yang bertujuan untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam konflik melawan Israel. Konflik tersebut juga telah melibatkan dunia Internasional, termasuk Indonesia. Peneliti tertarik dengan tema ini karena di mata dunia, konflik yang berkepanjangan dari kedua negara ini terus menerus menjadi bahan perbincangan yang selalu aktual dan menyeret banyak orang khususnya yang beragama Islam dari berbagai negara untuk terlibat dan hal ini menimbulkan persoalan pula di negara masing-masing.

Alasan kenapa peneliti tertarik meneliti tentang diplomasi kemanusiaan oleh KNRP Sumbar adalah karena pendanaan kemanusiaan yang diberikan oleh Pemprov Sumbar untuk Palestina hanya pada melalui KNRP Sumbar dan tidak melalui lembaga NGO lainnya yang ada di Sumbar. Pemprov Sumbar mempercayakan pendanaan kemanusiaan tersebut langsung diberikan oleh KNRP Sumbar sebagai perwakilan dari masyarakat Sumatera Barat untuk Palestina, hal tersebut yang menjadi daya tarik peneliti dalam melakukan penelitian ini, dan hal tersebut tidak semua perwakilan KNRP yang ada di Indonesia melakukan hal yang sama seperti KNRP Sumbar

1.2. Rumusan Masalah

KNRP merupakan salah satu wadah yang berperan serta dalam upaya mengentaskan kemiskinan, menyalurkan bantuan kemanusiaan dan membantu menyejahterakan masyarakat Palestina. Adapun Visi dari KNRP adalah Menjadi

lembaga kemanusiaan Nasional yang peduli terhadap permasalahan masjid Al Aqsha dan isu-isu kemanusiaan di Palestina.

Misi dari organisasi ini sendiri adalah mengkaji dan menyebarkan pemahaman serta opini yang benar seputar permasalahan Masjid Al Aqsha dan isu kemanusiaan yang dialami bangsa. KNRP menjalin kerjasama positif dengan lembaga-lembaga yang bekerja untuk membantu menyelesaikan permasalahan kemanusiaan di Palestina. Menjadi mediator bagi umat Islam dan bangsa Indonesia untuk mewujudkan solidaritasnya dalam memberikan dukungan dan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis Upaya KNRP (Komite Nasional Untuk Rakyat Palestina) SUMBAR dalam Diplomasi Kemanusiaan Indonesia ke Palestina Tahun 2022-2024.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, pertanyaan yang akan di jawab di penelitian ini adalah, “Bagaimana upaya yang dilakukan KNRP (Komite Nasional Untuk Rakyat Palestina) SUMBAR dalam diplomasi Kemanusiaan Indonesia ke Palestina Tahun 2022-2024?”

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Upaya KNRP (Komite Nasional Rakyat Palestina) SUMBAR dalam Diplomasi Kemanusiaan Indonesia ke Palestina Tahun 2022-2024.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis:

Diharapkan penelitian ini nantinya bisa dijadikan sumber referensi bagi akademisi, terutama kepada civitas departemen Ilmu Hubungan Internasional, terkhususnya dalam memahami mengenai Upaya KNRP (Komite Nasional Untuk Rakyat Palestina) SUMBAR dalam Diplomasi Kemanusiaan Indonesia ke Palestina Tahun 2022-2024. Dalam Studi Hubungan Internasional mengkaji efektivitas diplomasi multi-jalur Diplomasi Kemanusiaan melibatkan berbagai jalur, baik melalui jalur pemerintah maupun non-pemerintah. Penelitian ini dapat menganalisis efektivitas pendekatan multi-jalur dalam upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam melakukan diplomasi kemanusiaan di wilayah konflik seperti Palestina. Hal ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi diplomasi kemanusiaan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif. Penelitian ini dapat mengungkapkan peluang dan ruang lingkup tindakan yang dapat diambil oleh NGO dalam mendukung upaya Diplomasi Kemanusiaan. Hal ini dapat membantu NGO lain dalam merencanakan dan merancang program atau inisiatif yang sesuai dengan konteks konflik dan kebutuhan di lapangan.

1.6. Studi Pustaka

Studi Pustaka digunakan untuk membandingkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, sehingga dapat menjadi pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian. Studi pustaka ini dicantumkan untuk menemukan pembaharuan bagi penelitian penulis terhadap penelitian sebelumnya yang tema atau permasalahannya relatif sama. Selain itu, Studi Pustaka juga bermanfaat bagi penulis untuk menemukan fokus arah penelitian serta sudut pandang yang digunakan. Oleh sebab itu, peneliti akan menjelaskan secara singkat dan jelas dari beberapa bahan bacaan seperti buku, buku elektronik, jurnal, artikel, dan bahan bacaan ilmiah lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardianto Bayu Wibowo dan rekan-rekannya pada tahun 2022 berjudul *Peran Komite Nasional Untuk Rakyat Palestina (KNRP) sebagai Non-Government Organization (NGO) Indonesia di Wilayah Palestina*. Studi ini menunjukkan bahwa KNRP layak disebut sebagai sebuah LSM (lembaga swadaya masyarakat) karena bersifat nonpartisan, tidak berorientasi pada keuntungan, bekerja secara sukarela, dan berlandaskan gerakan moral. KNRP juga memenuhi prinsip-prinsip profesionalisme sebagai NGO, seperti dengan rutin melaporkan hasil kegiatan, berkomitmen dalam menyalurkan bantuan ke rakyat Palestina, memberikan informasi transparan kepada para donatur, serta aktif melakukan sosialisasi dan edukasi bagi calon donatur. Meski begitu, KNRP tidak memiliki peran sebagai mediator dalam konflik antara Palestina dan Israel. Lebih lanjut, penelitian ini mengungkap hubungan antara Indonesia dan Palestina dalam konteks hubungan internasional modern, termasuk kerja sama di bidang perdagangan, di mana Indonesia telah membebaskan bea cukai dan pajak

penghasilan (PPh) untuk Palestina. Selama ini, tidak pernah ada konflik atau persaingan antara kedua negara.

Penelitian yang ditulis oleh Ardianto Bayu Wibowo memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi penulis, khususnya dalam menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh KNRP layak dikategorikan sebagai aktivitas NGO (Non-Government Organization). Hal ini karena KNRP bersifat nonpartisan, tidak berorientasi pada keuntungan, dijalankan secara sukarela, serta berfokus pada gerakan moral. Selain itu, KNRP juga menunjukkan profesionalisme sebagai NGO dengan rutin melaporkan hasil kegiatan, konsisten dalam menyalurkan bantuan kepada rakyat Palestina, serta aktif menyediakan informasi kepada donatur dan melakukan edukasi kepada calon donatur. Namun, berbeda dari penelitian Ardianto, fokus peneliti kali ini adalah pada upaya KNRP dalam menjalankan diplomasi kemanusiaan menuju Palestina.

Penelitian kedua dilakukan oleh Aris, R. Z. (2019) dengan judul *Peran Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) dalam Bantuan Kemanusiaan untuk Pengungsi Palestina di Lebanon Tahun 2015*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran KNRP dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Palestina berdampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat internasional untuk turut serta memberikan dukungan, terutama dalam bentuk dana bantuan. Setelah KNRP menyalurkan bantuan, dukungan serupa mulai bermunculan dari berbagai negara seperti Mesir, Turki, dan beberapa negara di Eropa. Kondisi di Palestina sendiri masih dalam situasi terjajah oleh Israel.

Penelitian yang ditulis oleh Aris memberikan manfaat besar bagi penulis, khususnya dalam menjelaskan bahwa tujuan utama pendirian KNRP bukan sekadar

memberikan bantuan pada saat terjadi perang atau ketika rakyat Palestina menghadapi serangan senjata, bom, maupun intimidasi yang menyebabkan luka, penderitaan, bahkan kematian. Lebih dari itu, target jangka panjang KNRP adalah mendukung hingga tercapainya kemerdekaan penuh bagi Palestina. Hal ini terus diwujudkan melalui rotasi kepengurusan dan pelaksanaan berbagai kegiatan organisasi. Berbeda dengan fokus dalam penelitian Aris, peneliti kali ini akan menitikberatkan kajian pada upaya diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh KNRP terhadap Palestina.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Suratiningsih, D., Pupita, D., dan Safira, S. (2020) dengan judul *Diplomasi Pemerintah Indonesia dan NGO Kemanusiaan Indonesia dalam Isu Palestina pada Tahun 2014–2020*. Penelitian ini berangkat dari keprihatinan terhadap konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel, serta bertujuan untuk mengkaji upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan NGO yang bergerak dalam bidang kemanusiaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia tampak dari peran aktifnya dalam menyalurkan bantuan, baik yang digagas oleh pemerintah maupun masyarakat secara langsung. Tingginya kepedulian masyarakat inilah yang mendorong lahirnya berbagai NGO, yang berfungsi tidak hanya sebagai penyalur bantuan, tetapi juga sebagai bentuk solidaritas dan perjuangan bagi rakyat Palestina.

Penelitian yang ditulis oleh Suratiningsih, D. sangat bermanfaat bagi penulis, terutama karena memiliki kesamaan dalam menjelaskan pentingnya memahami konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel serta upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan NGO yang bergerak di bidang kemanusiaan. Namun, berbeda dengan fokus dalam penelitian tersebut,

peneliti akan mengarahkan kajian pada bentuk-bentuk upaya yang dilakukan oleh KNRP dalam menjalankan diplomasi kemanusiaan ke Palestina selama periode 2022–2024.

Penelitian keempat dilakukan oleh Ratna Sari (2023) dengan judul *Diplomasi Kemanusiaan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kawasan Konflik (Studi tentang Diplomasi Kemanusiaan MER-C di Jalur Gaza Palestina)*. Hasil penelitian ini mengungkap strategi yang digunakan oleh MER-C dalam menjalankan diplomasi kemanusiaan di Jalur Gaza, antara lain melalui politik informasi, simbolisme politik, leverage politik, dan politik akuntabilitas. Namun, MER-C juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti fluktuasi kebijakan pemerintah Mesir yang kerap membuka dan menutup perbatasan Rafah secara tidak menentu, keterbatasan kemampuan relawan dalam berbahasa asing, serta kendala dana dalam penyaluran bantuan ke wilayah konflik tersebut.

Penelitian yang ditulis oleh Ratna Sari sangat bermanfaat bagi penulis, terutama karena memiliki kesamaan dalam menjelaskan peran MER-C sebagai organisasi kemanusiaan internasional yang aktif di wilayah konflik. Penelitian tersebut menguraikan strategi yang dijalankan MER-C dalam diplomasi kemanusiaan di Jalur Gaza Palestina, seperti melalui politik informasi, simbolisme politik, leverage politik, dan akuntabilitas politik. Di sisi lain, MER-C juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kebijakan pemerintah Mesir yang tidak menentu terkait pembukaan perbatasan Rafah, keterbatasan relawan dalam kemampuan berbahasa asing, hingga persoalan pendanaan untuk distribusi bantuan.

Tulisan kelima merupakan karya Basaroh, N. (2019) yang berjudul *Peran Aksi Cepat Tanggap dalam Diplomasi Kemanusiaan untuk Membantu Penanganan*

Krisis Kemanusiaan di Luar Negeri (2012–2019). Penelitian ini membahas peran ACT dalam diplomasi kemanusiaan melalui lima bentuk upaya utama. Pertama, mengatur kehadiran ACT di wilayah-wilayah krisis; kedua, menegosiasikan akses untuk menjangkau penduduk sipil yang membutuhkan bantuan dan perlindungan; ketiga, memantau pelaksanaan program-program bantuan; keempat, mempromosikan penghormatan terhadap hukum dan norma internasional; dan kelima, melakukan advokasi di berbagai tingkatan demi mendukung tujuan-tujuan kemanusiaan.

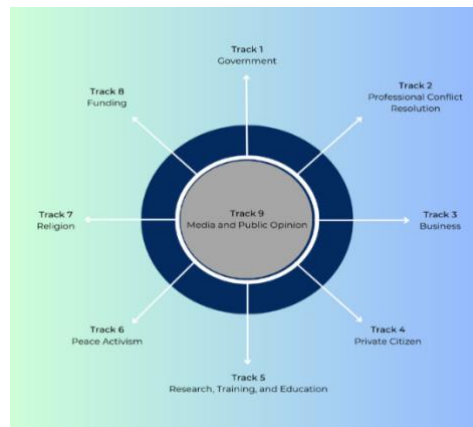
Penelitian yang ditulis oleh Basaroh, N. sangat bermanfaat bagi penulis, khususnya karena memiliki kesamaan dalam membahas peran organisasi non-pemerintah, dalam hal ini ACT, dalam diplomasi kemanusiaan. Namun, berbeda dengan fokus dalam penelitian yang ditulis oleh Putri, F. A., peneliti dalam kajian ini akan menitikberatkan pada identifikasi bentuk-bentuk upaya yang dilakukan oleh Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) dalam diplomasi kemanusiaan menuju Palestina pada tahun 2022–2024.

Dari kelima studi pustaka yang telah dikaji, terdapat persamaan utama yaitu seluruh penelitian membahas peran NGO dalam diplomasi kemanusiaan, khususnya di wilayah konflik seperti Palestina. Perbedaannya terletak pada fokus kajian masing-masing. Penelitian ini secara spesifik akan mengulas bentuk-bentuk konkret upaya diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh KNRP, sebuah lembaga kemanusiaan asal Indonesia, selama periode 2022–2024.

1.7. Kerangka Konseptual

1.7.1. Diplomasi Multijalur

Peneliti akan menggunakan konsep *Multi-track Diplomacy*, yang dikembangkan oleh Louise Diamond dan John W. McDonald dalam bukunya “*Multi-track Diplomacy: A System Approach to Peace*” yang diterbitkan pada tahun 1996. Konsep *Multi-track Diplomacy* menggambarkan perdamaian internasional sebagai sistem kehidupan yang saling terhubung antara individu, organisasi dan komunitas yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu terwujudnya perdamaian dunia.¹³



Gambar 1. 1 Bagan Konsep Multitrack diplomacy
Sumber: Louise Diamond dan John W. McDonald, 1966

Track 1: Government

Pemerintah terus berusaha menciptakan perdamaian melalui diplomasi, membuat kebijakan dan membangun perdamaian melalui bagian formal proses pemerintahan, seperti eksekutif, Kementerian, kedutaan besar dan lain-lain.

Track 2: Non-Government/Professional

¹³ Mcdonald, John W. “The Institute for Multi-Track Diplomacy.” *Journal Of Conflictology* 3, No. 2 (2012): 66–70. <https://doi.org/10.7238/Joc.V3i2.1629>.

Aspek kedua melibatkan profesional non-pemerintah yang menangani analisis, pencegahan, penyelesaian dan pengelolaan konflik internasional.

Track 3: Business

Aktivitas bisnis adalah track ketiga. Bisnis tidak selalu berfokus pada keuntungan ekonomi; mereka juga berusaha untuk menciptakan perdamaian melalui peluang ekonomi, jaringan komunikasi informal dan dukungan untuk pembangunan perdamaian.

Track 4: Private Citizen

Pada track 4, warga negara yang berupaya secara pribadi dapat berusaha melalui berbagai bidang dan aktivitas perdamaian dan pembangunan. Mereka dapat melakukan ini melalui diplomasi warga negara, program pertukaran pelajar dan pemuda, organisasi kerelawanan, organisasi non-pemerintah dan kelompok khusus.

Track 5: Research, Educating,

Pada track kelima ini mencakup tiga bidang. Pertama, penelitian yang berhubungan dengan program universitas, wadah pemikir (think tanks), dan pusat penelitian khusus. Kedua, pelatihan yang mengajarkan keterampilan khusus dalam proses perdamaian, seperti negosiasi, mediasi dan resolusi konflik. Ketiga, pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga program doktoral yang mencakup berbagai aspek global.

Track 6: Peace Activism

Aktivis track keenam bekerja di bidang perdamaian dan lingkungan tentang hal-hal seperti perlucutan senjata, hak asasi manusia, keadilan sosial dan ekonomi, serta mendukung kelompok kepentingan terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aktivis ini berfungsi untuk mengawasi kebijakan pemerintah.

Track 7: Religion

Track ketujuh membahas aspek religi atau kepercayaan. Track ini menjelaskan upaya komunitas keagamaan untuk menciptakan perdamaian dan melakukan hal-hal yang didasarkan pada moralitas seperti keadilan dan anti-kekerasan. Keagamaan memiliki peran penting dalam menciptakan perdamaian karena nilai-nilai penting perdamaian terletak pada nilai-nilai agama yang dapat diterapkan oleh setiap orang.

Track 8: Funding

Pada track kedelapan ada istilah “pendanaan” yang mengacu pada komunitas pendanaan. Komunitas pendanaan dapat berupa organisasi atau individu dermawan yang menawarkan dukungan keuangan untuk inisiatif yang dilakukan oleh track lain.

Track 9: Media and Public Opinion

Pada bagian terakhir ini, dia membahas upaya media massa untuk menyampaikan suara public, yaitu bagaimana opini publik dibentuk dan diekspresikan oleh media cetak, video, radio, elektronik dan seni. Media berkontribusi secara signifikan pada masalah konflik, perdamaian dan penyelesaian konflik. Dengan begitu, informasi akan menyebar lebih

cepat dan mendorong orang-orang di seluruh dunia untuk bekerja sama untuk mencapai perdamaian.

Maka dari itu, kerangka konseptual yang ada diatas, penulis menganalisis upaya KNRP (Komite Nasional Untuk Rakyat Palestina) SUMBAR dalam Diplomasi Kemanusiaan Indonesia ke Palestina Tahun 2020-2024 sebagai NGO (*Non-Government Organization*) dalam *Multitrack diplomacy* terdapat 7 jenis track mengupayakan terciptanya perdamaian. Dalam penelitian ini penulis menganalisis pada 3 track yaitu *Peace Activism*, *Religion dan Funding*. Ketiga unsur ini bukan hanya saling melengkapi, tetapi telah terbukti menjadi fondasi kuat dalam keberhasilan diplomasi masyarakat sipil Indonesia, khususnya dalam konteks solidaritas terhadap Palestina.

Aktivisme perdamaian (*peace activism*) berperan penting dalam menciptakan tekanan publik internasional serta menjaga kesinambungan dukungan moral terhadap perjuangan rakyat Palestina. Para aktivis kerap menjadi penghubung antara aspirasi rakyat dan kebijakan luar negeri, terutama dalam diplomasi non-negara (*track 2 dan 6*), yang sangat vital dalam konteks konflik berkepanjangan (Saragih et al., 2023).

Sementara itu, pendekatan berbasis agama memberikan legitimasi moral dan emosional yang tinggi. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, nilai-nilai keislaman yang dikampanyekan oleh ormas seperti Muhammadiyah dan KNRP memperkuat komitmen publik untuk terus memberikan dukungan kemanusiaan kepada Palestina (Nubowo, 2023; Husein & Kurniawan, 2024). Agama di sini bukan sekadar simbol,

tetapi menjadi *justifikasi etik* bagi diplomasi kemanusiaan yang aktif dan responsif.

Aspek pendanaan menjadi landasan struktural yang memungkinkan berjalannya program-program konkret, seperti pembangunan rumah sakit, bantuan pangan, hingga misi kemanusiaan ke Gaza. Banyak studi menunjukkan bahwa organisasi filantropi dan zakat memainkan peran signifikan dalam mendanai diplomasi kemanusiaan Indonesia ke Palestina (Shiddiqy, 2024). Dana dari masyarakat sipil Indonesia disalurkan melalui lembaga-lembaga resmi yang menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pendekatan komprehensif ini sejalan dengan visi *multitrack peacebuilding* yang dikaji oleh Samad et al. (2023), di mana Indonesia digambarkan sebagai aktor aktif dalam diplomasi digital dan berbasis masyarakat terhadap konflik Palestina-Israel. Strategi KNRP Sumatera Barat mencerminkan kesinambungan nilai-nilai kemanusiaan, agama, dan nasionalisme dalam praktik diplomasi yang bersifat bottom-up.

1.7.2. Diplomasi Kemanusiaan

Diplomasi pada umumnya merupakan suatu upaya dalam mencapai kepentingan. Diplomasi kemanusiaan yang dilakukan secara tradisional atau klasik biasanya dilakukan oleh para aktor kemanusiaan internasional diantaranya; PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), dan LSM internasional¹⁴. Diplomasi kemanusiaan melihat upaya apa yang dapat dilakukan untuk mendapatkan akses demi membantu masyarakat yang sedang mengalami

¹⁴ Lina Gong, "Humanitarian Diplomacy as an Instrument for China's Image-Building," *Asian Journal of Comparative Politics* 6, no. 3 (Mei 2025): <https://doi.org/10.1177/20578911211019257>.

krisis kemanusiaan dan pada umumnya diplomasi kemanusiaan ini melibatkan banyak pihak serta dapat berkembang sesuai dengan keadaan atau kondisional yang bergantung pada kondisi yang terjadi pada suatu masa¹⁵. Diplomasi kemanusiaan tidak menggunakan senjata agar tujuan bisa tercapai. Apabila menggunakan kekerasan maka diplomasi kemanusiaan dikatakan telah gagal dalam menggapai tujuan yang dimaksud. Karena pada dasarnya penggunaan kekerasan bukan bagian dari diplomasi kemanusiaan serta diplomasi kemanusiaan tidak menggunakan kekuatan militer yang dapat merusak¹⁶.

Menurut Harrof-Tavel, diplomasi kemanusiaan merupakan cara dan strategi yang digunakan untuk menyelesaikan atau bahkan mencegah masalah kemanusiaan melalui tahap dialog, negoisasi dan proses penyusunan aturan. Strategi ini melibatkan serangkaian representasi yang direncanakan dari waktu ke waktu, setiap tahap terdiri dari pilihan yang bergantung pada reaksi pihak lain¹⁷. Sementara menurut Egeland dalam hal fungsionalitas diplomasi kemanusiaan, itu adalah seni memfasilitasi bantuan yang optimal, melibatkan aktor dan jalur komunikasi yang paling efektif, untuk menghindari penundaan yang tidak perlu dan untuk menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Diplomasi kemanusiaan juga bertindak sebagai strategi kesiapsiagaan untuk mengatasi penyumbatan sistem sebelumnya, terutama Ketika

¹⁵ Ardli Johan Kusuma dan Fernando Ersento Maraden Sitorus, "Strategi Diplomasi Kemanusiaan Pemerintah Indonesia Dalam Kasus Krisis Kemanusiaan Yang Dialami Etnis Rohingya Di Myanmar Tahun 2017," *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 2, no. 2 (23 November 2019): 155, <https://doi.org/10.33822/mjihi.v2i2.1322>.

¹⁶ Diplomasi Indonesia dalam Menyelesaikan Krisis Pengungsi Rohingya Tahun 2017 | *Nation State: Journal of International Studies*, 117, diakses 25 September 2022, <https://jurnal.amikom.ac.id/index.php/nsjis/article/view/121>.

¹⁷ Alistair DB Cook, "Humanitarian Diplomacy in ASEAN," *Asian Journal of Comparative Politics* 6, no. 3 (September 2021): 3, <https://doi.org/10.1177/20578911211019247>

mempertimbangkan bahaya alam. Kegiatan kesiapsiagaan ini dilakukan dalam bentuk latihan atau simulasi, pengenalan prosedur operasi standar, kepatuhan terhadap standar sectoral, investasi dalam peningkatan kapasitas mekanisme nasional dan pengembangan profesional birokrat, serta dialog kebijakan strategis, pertukaran dan jejaring kegiatan.

Definisi diplomasi kemanusiaan yang paling banyak beredar adalah versi *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dan *International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)*. Egeland mengatakan bahwa terlepas dari perbedaannya, definisi kedua lembaga kemanusiaan ini bertemu untuk memengaruhi pemangku kepentingan utama melalui cara damai seperti persuasi dan negosiasi untuk kepentingan kemanusiaan. Sementara Reginier mengatakan bahwa berbagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti Badan Pengungsi PBB (UNHCR) dan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) memiliki keterlibatan yang terkenal dalam kegiatan khusus diplomasi kemanusiaan seperti negosiasi untuk akses ke populasi yang terkena dampak serta mobilisasi bantuan darurat, organisasi belum mengembangkan definisi formal untuk mewakili upaya diplomatik di bidang ini. Komunitas kemanusiaan dan ilmiah telah mengadopsi ungkapan ‘‘diplomasi kemanusiaan’’ sejak tahun 2000-an, namun definisi terpadu tetap sulit dipahami. Di luar perdebatan konseptual, diplomasi kemanusiaan memang memberikan lensa yang berguna untuk memahami strategi berbagai aktor yang terlibat dalam urusan kemanusiaan¹⁸.

¹⁸ Alistair DB Cook dan Lina Gong, ‘‘Humanitarian diplomacy in the Asia-Pacific: Part I,’’ *Asian Journal of Comparative Politics* 6, no. 3 (1 September 2021): 184, <https://doi.org/10.1177/20578911211045668>.

Sebagian besar penulis cenderung setuju bahwa diplomasi kemanusiaan mengacu pada semua kegiatan negosiasi yang dilakukan oleh para aktor dengan pemerintah, (para) organisasi militer, atau tokoh masyarakat untuk campur tangan dalam konteks di mana umat manusia dalam bahaya. Tujuannya mungkin juga untuk membujuk pembuat keputusan dan pemimpin opini untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Definisi ini masih kabur, namun karena tidak banyak berbicara tentang aktor yang melakukan negosiasi ini dan kegiatan advokasi. Dua konsepsi yang bersaing hidup berdampingan, yang restriktif dan yang berpandangan luas. Menurut Minear dan Smith pandangan restriktif, kegiatan ini khusus untuk organisasi swasta kemanusiaan dan beberapa Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk pandangan yang luas, yang dikemukakan Veutey organisasi kemanusiaan, negara, dan organisasi internasional terlibat dalam diplomasi kemanusiaan ketika tujuan dari tindakan mereka adalah untuk mempertahankan martabat manusia¹⁹.

Dilihat dari berbagai pendapat yang telah disampaikan di atas bahwa dapat dipahami diplomasi kemanusiaan adalah cara atau alat untuk menolong umat manusia dari segala kesulitan yang mereka rasakan akibat dari konflik, peperangan maupun bencana alam. Diplomasi ini memiliki keunikannya tersendiri karena dalam pengimplementasiannya dapat berubah sesuai dengan kondisi yang terjadi di tempat diplomasi tersebut akan dijalankan. Nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam diplomasi ini membuktikan bahwa

¹⁹ Thierry Balzacq, Frédéric Charillon, dan Frédéric Ramel, ed., *Global Diplomacy: An Introduction to Theory and Practice* (Cham: Springer International Publishing, 2020), 256, <https://doi.org/10.1007/978-3-030-28786-3>.

diplomasi kemanusiaan tidak memandang manusia dari aspek apa pun baik itu warna kulit, ras, suku bangsa atau hal lainnya. Dengan diterapkannya diplomasi kemanusiaan ini oleh seluruh elemen masyarakat baik itu masyarakat sebagai individu atau lembaga profesional maka diharapkan perdamaian dunia akan terwujud.

1.8. Metode Penelitian

Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan tertulis, seperti tulisan yang diperoleh dari pernyataan resmi, dokumen dan penelitian sebelumnya, serta data sekunder lainnya. Menurut Boogdan dan Taylor, metode kualitatif menghasilkan data deskriptif, yaitu kata tertulis dan lisan dari orang serta perilaku yang mereka amati.²⁰

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, dengan tujuan mengungkapkan, menyelidik dan menganalisis fenomena yang terjadi dengan mempertimbangkan hubungan sebab akibat antara variabel independent dan variabel dependen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fenomena tersebut terjadi. Teori multi-track diplomacy, yang diciptakan oleh Louise Diamond dan John W. McDonald, digunakan dalam penelitian untuk melihat upaya KNRP (Komite Nasional untuk Rakyat Palestina) Sumbar dalam diplomasi kemanusiaan Indonesia ke Palestina dari tahun 2022 hingga 2024.

²⁰ Lexo Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), Hal.14.

1.8.2. Batasan Penelitian

Penelitian memerlukan batasan masalah untuk menyempitkan topik penelitian. Ini dilakukan agar hasil penelitian konsisten dengan rumusan masalah dan latar belakangnya. Batasan masalah juga digunakan untuk menjaga konsistensi penulis dan mencegah tulisan menjadi terlalu luas. Penelitian ini berfokus pada tahun 2022-2024.

1.8.3. Unit dan Level Analisis

Unit analisis, juga dikenal sebagai variabel dependen adalah entitas yang perilakunya akan dianalisis. Studi ini menganalisis upaya KNRP Sumbar dalam diplomasi kemanusiaan Indonesia ke Palestina pada tahun 2022-2024. Unit eksplanasi yang biasanya disebut sebagai variabel independent, adalah item yang mempengaruhi unit analisis yang akan digunakan atau diamati.²¹ Oleh karena itu, unit eksplanasinya adalah Citra Indonesia Dalam Isu Kemanusiaan dan Tragedi Kemanusiaan di Palestina.

Level analisis adalah tingkatan objek yang pada dasarnya menjadi fokus utama diskusi penelitian, sehingga menentukan level analisis yang tepat untuk penelitian ini akan membantu peneliti dalam memilih faktor-faktor yang akan ditekankan.²² Mohtar Mas'ood mengatakan bahwa ada lima tingkat analisis: individu, kelompok, negara, kelompok negara dan sistem internasional.²³ Oleh karena itu, tingkat analisis penelitian ini adalah kelompok KNRP Sumatera Barat. Ini karena penelitian akan menganalisis

²¹ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*, 39.

²² Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*, 41.

²³ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*, 46.

upaya KNRP Sumbar dalam diplomasi kemanusiaan Indonesia ke Palestina tahun 2022 hingga 2024.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Data primer adalah data utama yang diperlukan untuk penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dalam penelitian ini.²⁴ Jenis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang berkaitan dengan upaya KNRP Sumbar dalam diplomasi kemanusiaan Indonesia ke Palestina dari tahun 2022 hingga 2024.

1.8.5. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Untuk mengurangi data, seseorang harus merangkum, menfokuskan dan memilih hal-hal yang penting, mencari tema dan pola, memilah yang dianggap perlu dan tidak dibutuhkan dan kemudian menyederhanakannya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan penguumpulan data berikutnya akan menjadi lebih mudah. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti akan melakukan analisis berdasarkan kerangka konsep *Multi-Track Diplomacy: A System Approach to Peace*, sehingga memunculkan pola perilaku kelompok negara, yaitu Upaya KNRP (Komite Nasional Rakyat Palestina) SUMBAR dalam Diplomasi Kemanusiaan Indonesia ke Palestina Tahun 2022-2024

²⁴ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Dan Mixed*, Edisi Ketiga, Bandung: Pustaka Pelajar, (2012)

2. Penyajian data

Pada tahap ini adalah dalam bentuk uraian atau deskripsi, hubungan antar kategori dan juga jenis, serta bagan. Oleh karena itu, peneliti akan mendeskripsikan hasil dari reduksi data, sehingga menjadi analisis yang memiliki tujuan untuk menjelaskan Upaya KNRP (Komite Nasional Rakyat Palestina) SUMBAR dalam Diplomasi Kemanusiaan Indonesia ke Palestina Tahun 2022-2024. Penyajian data ini berdasarkan kepada sumber rujukan yang resmi yang memberikan dasar yang kuat dalam menggambarkan dan juga menganalisis kondisi yang sesuai dengan data dan fakta.

3. Menarik kesimpulan (*conclusions*)

Menarik kesimpulan merupakan pengambilan dari pengumpulan data, alur, dan proporsi-proporsi lainnya. Artinya melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi yang memungkinkan peneliti bisa menjawab rumusan masalah. Hasil menarik kesimpulan akan diinterpretasikan melalui tulisan dalam penelitian ini. Dengan demikian, penulis akan menginterpretasikan hasil analisis yang sudah dilakukan sebelumnya, melalui tulisan dalam penelitian ini, sehingga mampu menjawab rumusan masalah. Pada tahap ini, lebih memberikan gambaran yang komprehensif dan konklusif mengenai Upaya KNRP (Komite Nasional Rakyat Palestina) SUMBAR dalam Diplomasi Kemanusiaan Indonesia ke Palestina Tahun 2022-2024

1.9. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, temuan dari studi pustaka, penjabaran dari kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian, metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, batasan penelitian, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II Indonesia dalam Isu Kemanusiaan dan Tragedi Kemanusiaan di Palestina

Bab ini akan menjelaskan terkait citra Indonesia dalam isu kemanusiaan dan tragedi kemanusiaan di Palestina dengan KNRP yang memiliki fokus sebagai Lembaga Non Pemerintah (*Non-Government Organization/ NGO*) yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan bertujuan untuk membantu rakyat Palestina.

BAB III KNRP (Komite Nasional untuk Rakyat Palestina) SUMBAR dalam Diplomasi Multijalur Indonesia

Bab ini akan menjelaskan secara mendalam mengenai peran strategis Komite Nasional Rakyat Palestina (KNRP) dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, khususnya melalui pendekatan diplomasi kemanusiaan (*humanitarian diplomacy*).

BAB IV Analisis Upaya KNRP (Komite Nasional untuk Rakyat Palestina) SUMBAR dalam Diplomasi Kemanusiaan Indonesia ke Palestina Tahun 2022-2024

Pada bab ini masuk ke analisis penulis yang membahas mengenai Upaya KNRP (Komite Nasional Rakyat Palestina) SUMBAR dalam Diplomasi Kemanusiaan Indonesia ke Palestina Tahun 2022-2024. Bab ini merupakan bagian pengujian dalam menggunakan teori yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menganalisis, yaitu teori konsep *Multi-Track Diplomacy: A System Approach to Peace*.

BAB V Kesimpulan

Pada bagian ini akan berisikan tentang keseluruhan pembahasan yang diringkas dari penelitian ini, dan terdapat saran dari penulis untuk penulis selanjutnya dan para pihak yang terlibat dalam melanjutkan serta mengembangkan penelitian agar lebih baik lagi.